

ABSTRAK

Permasalahan mengenai penyimpangan berupa pelanggaran kode etik profesi Polri, peraturan disiplin Polri dan tindak pidana masih menjadi persoalan relevan dibicarakan pada saat ini, karena polisi dianggap sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dalam pelaksanaannya kadang kala polisi melakukan tindakan-tindakan yang meindikasikan adanya penyimpangan seperti tindakan sewenang-wenang, diskriminasi hukum, melakukan tindak pidana, hingga kehidupan dilingkungan masyarakat yang intoleransi. Hal ini yang menyebabkan citra Polri dimata masyarakat kurang baik. Oleh Karena itu, akuntabilitas divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) khususnya dilingkungan Polda Jawa Tengah sangat diperlukan sebagai upaya pecegahan dan penanggulangan serta meakukan pengawasan yang baik terhadap anggota Polri yang melakukan penyimpangan.

Metode yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini menggunakan yuridis empiris, dimana penelitian difokuskan terhadap pelaksanaan penegakkan hukum dan pengawasan oleh Propam kepada anggota Polri yang melakukan penyimpangan serta upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi dan menanggulangnya. Lokasi penelitian berada di Mapolda Jawa Tengah dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan kajian kepustakaan.

Hasil dari kegiatan penelitiannya yaitu masih banyak anggota Polri di Jawa Tengah yang melakukan penyimpangan berupa Kode Etik Profesi Polri, Pelanggaran Disiplin Polri, serta tindak pidana yang nilainya fluktuatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Propam belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Namun hal ini menjadi fokus utama bagi Kapolda dalam meningkatkan kinerja Polisi untuk menjadi tugas utama Polri yang baik bagi masyarakat, yaitu sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

Kata kunci: Polisi, Penyimpangan, Pengawasan dan Penegakkan Hukum, Divisi Propam.